

BAB II KERANGKA KONSEPTUAL

A. Manajemen Masjid

1. Pengertian Manajemen Masjid

Manajemen masjid merupakan suatu proses yang terorganisasi secara sistematis yang mencakup serangkaian kegiatan penting seperti perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), hingga pengawasan (*controlling*), yang semuanya diarahkan untuk mengelola seluruh aspek yang berkaitan dengan keberadaan dan operasional masjid. Tujuan utama dari penerapan manajemen ini adalah untuk memastikan bahwa masjid dapat menjalankan fungsi utamanya secara optimal, yakni sebagai tempat pelaksanaan ibadah mahdhah seperti shalat berjamaah, membaca Al-Qur'an, dan kegiatan keagamaan lainnya, serta sebagai pusat pembinaan umat Islam dalam bidang pendidikan, sosial, dan dakwah secara luas dan berkesinambungan.²⁹

lebih jauh lagi, pengelolaan masjid yang baik dan profesional tidak hanya terbatas pada penyelenggaraan kegiatan keagamaan semata, melainkan juga mencakup pengelolaan aset dan keuangan masjid secara transparan, pemeliharaan fasilitas fisik seperti bangunan, sarana ibadah, dan lingkungan masjid, serta perancangan program-program pemberdayaan umat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat sekitar.

Dengan demikian, masjid dapat memainkan peran strategis sebagai institusi sosial yang mampu memberikan kontribusi nyata dalam membangun peradaban Islam yang maju dan berdaya saing.³⁰

Dalam konteks manajemen modern, masjid bahkan dipandang sebagai organisasi nirlaba (*non-profit organization*) yang harus dikelola secara profesional, efisien, dan akuntabel, layaknya organisasi-organisasi sosial lainnya yang berfokus pada pelayanan

²⁹ Imron Arifin, *Manajemen Masjid: Strategi Pengelolaan Masjid Sebagai Pusat Pemberdayaan Umat* (Jakarta: Prenadamedia, 2017)

³⁰ Ahmad Zaini, *Pengelolaan Masjid yang Efektif dan Efisien* (Yogyakarta: Deepublish, 2019)

publik. Oleh karena itu, manajemen masjid sebaiknya melibatkan pembentukan struktur organisasi yang jelas dan terdefinisi, adanya pembagian tugas dan fungsi antar pengurus yang proporsional, penerapan sistem administrasi dan dokumentasi yang rapi, serta pengelolaan keuangan yang terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan kepada jamaah dan masyarakat luas.³¹

2. Unsur-unsur Manajemen Masjid

Dalam praktiknya, pengelolaan masjid mencakup berbagai unsur yang saling mendukung dan harus dijalankan secara terpadu agar masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah semata, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, sosial, dan pemberdayaan umat. Unsur-Unsur tersebut antara lain:

a. Kepengurusan atau Struktur Organisasi

Unsur pertama yang sangat penting adalah kepengurusan atau struktur organisasi masjid. Pengurus masjid biasanya terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, serta beberapa bidang atau seksi yang menangani urusan tertentu seperti bidang ibadah, pendidikan, sosial, dan kebersihan. Struktur ini diperlukan agar setiap tugas dapat dibagi secara adil dan terorganisir. Kejelasan wewenang dan tanggung jawab antar anggota pengurus akan menciptakan efisiensi kerja dan menghindari tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan.³²

b. Perencanaan Program (*Planning*)

Perencanaan merupakan proses awal dalam manajemen yang tidak boleh diabaikan. Masjid yang dikelola dengan baik biasanya memiliki visi dan misi yang jelas serta tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Perencanaan ini mencakup penyusunan program kerja seperti pengajian rutin, kegiatan sosial, pembangunan fisik masjid, dan kegiatan keagamaan tahunan seperti Ramadhan atau Idul Adha. Dengan perencanaan yang terstruktur, pengurus dapat mengatur

³¹ Muhammad Hasyim, *Masjid dan Dinamika Sosial: Telaah Manajemen Masjid masa kini* (Bandung: Mizan, 2020)

³² Ahmad Wahid, *Manajemen Masjid dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2019)

prioritas kegiatan dan pengalokasian sumber daya secara bijak.³³

c. Pengelolaan Keuangan

Salah satu unsur krusial lainnya adalah pengelolaan keuangan. Masjid sebagai lembaga sosial-religius menerima dana dari berbagai sumber seperti infak, sedekah, wakaf, dan donasi jamaah. Oleh karena itu, pengurus masjid wajib mengelola dana tersebut secara transparan dan akuntabel. Laporan keuangan yang disusun secara berkala dan diumumkan kepada jamaah merupakan bentuk tanggung jawab publik yang memperkuat kepercayaan umat terhadap pengurus.³⁴

d. Manajemen Ibadah

Kegiatan ibadah merupakan inti dari fungsi masjid. Oleh karena itu, perlu ada pengelolaan yang baik terhadap seluruh kegiatan ibadah seperti salat berjamaah, khutbah Jumat, kajian Islam, serta kegiatan keagamaan lainnya. Pengurus harus memastikan tersedianya imam, khatib, dan ustaz yang kompeten serta menjadwalkan kegiatan secara teratur. Hal ini akan menciptakan suasana spiritual yang kondusif dan menarik lebih banyak jamaah untuk aktif.³⁵

e. Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengelolaan SDM di lingkungan masjid mencakup perekrutan, pembinaan, dan pengembangan kapasitas para pengurus serta relawan. Masjid tidak hanya membutuhkan tenaga kerja yang ikhlas, tetapi juga profesional dalam mengelola kegiatan dan melayani umat. Pelatihan seperti manajemen organisasi, komunikasi dakwah, dan administrasi

³³ Muhammad Hasan, *Strategi Perencanaan Program Masjid Berbasis Masyarakat* (Jakarta: Mizan Publika, 2020)

³⁴ Mochammad Nurhadi, "Transparansi Keuangan Masjid: Studi Kasus di Masjid Raya Bandung", *Nalar: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.5 No. 2, (2021)

³⁵ Lukman Yusuf, *Manajemen Ibadah dan peran Masjid dalam Pembinaan Umat* (Malang: UIN Press, 2018)

sangat diperlukan untuk meningkatkan kapasitas pengurus dalam menjalankan amanahnya.³⁶

f. Manajemen Sarana dan Prasarana

Masjid sebagai tempat umum perlu menjaga kenyamanan dan kebersihan fasilitasnya. Pengelolaan sarana prasarana mencakup pemeliharaan bangunan, tempat wudu, toilet, sistem suara, pendingin ruangan, parkir, dan perpustakaan. Ketersediaan fasilitas yang bersih dan memadai akan menciptakan kenyamanan dalam beribadah dan mendorong jamaah untuk lebih aktif datang ke masjid.³⁷

g. Manajemen Informasi dan Komunikasi

Unsur ini mencakup pengelolaan penyampaian informasi kepada jamaah mengenai kegiatan masjid melalui media pengumuman, selebaran, grup WhatsApp, media sosial, maupun website. Informasi yang cepat dan tepat sangat penting agar jamaah dapat terlibat dalam kegiatan masjid. Selain itu, komunikasi internal antar pengurus juga harus dijaga agar koordinasi berjalan lancar.³⁸

h. Manajemen Sosial dan Pemberdayaan Umat

Masjid juga memiliki fungsi sosial yang sangat vital, yaitu sebagai agen perubahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan seperti pembagian zakat, santunan anak yatim, beasiswa, pelatihan keterampilan, dan koperasi masjid menjadi bentuk nyata dari peran sosial tersebut. Dengan adanya kegiatan ini, masjid mampu memperluas jangkauan manfaatnya ke seluruh lapisan masyarakat, khususnya kalangan dhuafa dan fakir miskin.³⁹

³⁶ Abdul Ridwan, "Pengembangan SDM Masjid: Konsep dan Implementasi", Nalar: *Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, Vol. 7 No.1, (2020)

³⁷ Ahmad Syarifudin, *Manajemen Fasilitas Masjid: Teori dan Praktik* (Bandung: Alfabeta, 2017)

³⁸ Dian Rahmawati, "Peran Media Sosial Dalam Komunikasi Masjid", Nalar: *Jurnal Komunikasi Islam Modern*, Vol.4 No. 3, (2022)

³⁹ Abdullah Karim, *Masjid Sebagai Pusat Pemberdayaan Umat* (Yogyakarta: Gema Insani, 2019)

3. Karakteristik Manajemen Masjid

Manajemen masjid memiliki ciri khas tersendiri yang membedakannya dari jenis manajemen pada umumnya, karena pengelolaan masjid harus didasarkan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama Islam. Oleh sebab itu, setiap aktivitas dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan masjid harus senantiasa mengacu pada ajaran Islam yang meliputi nilai keimanan, ketakwaan, serta niat ikhlas dalam melayani umat. Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi utama agar pengelolaan masjid tidak hanya bersifat administratif semata, melainkan juga bernilai ibadah dan spiritual bagi seluruh pengurus dan jamaah.⁴⁰ selain berfungsi sebagai tempat ibadah, masjid juga berperan penting sebagai pusat aktivitas sosial, pendidikan, dan dakwah bagi komunitas di sekitarnya.

Manajemen masjid harus mampu mengelola berbagai kegiatan yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara luas, baik dari sisi keagamaan maupun aspek sosial kemasyarakatan. Dengan demikian, pengelolaan masjid difokuskan pada pelayanan terbaik kepada jamaah dan lingkungan sekitar agar masjid dapat menjadi pusat kemajuan umat.⁴¹

Secara struktur organisasi, manajemen masjid biasanya terdiri dari kelompok pengurus yang relatif sederhana, dengan pembagian tugas yang jelas seperti imam masjid, bendahara, sekretaris, serta beberapa seksi atau divisi yang menangani bidang-bidang tertentu seperti kebersihan, keuangan, dakwah, dan pendidikan. Struktur yang sederhana ini memberikan kemudahan dalam koordinasi antar pengurus dan mempercepat proses pengambilan keputusan sehingga semua kegiatan dapat berjalan efektif dan efisien.⁴²

Karakteristik penting lain dari manajemen masjid adalah keterlibatan aktif jamaah dalam pengelolaan masjid. Pengurus

⁴⁰ Abdullah Saeed, *Islamic Thought: An Introduction* (Inggris: Routledge, 2006) 45.

⁴¹ Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan Pustaka, 2002), 112

⁴² Muhammad syafi'I Antonio, *Manajemen Dakwah* (Jakarta: Tazkia Publishing, 2017) 78.

tidak bekerja sendiri, melainkan mengajak partisipasi dari seluruh anggota jamaah dalam berbagai kegiatan, baik dalam bentuk kehadiran, dukungan tenaga, maupun pendapat dalam musyawarah. Partisipasi ini memperkuat rasa memiliki masjid di antara umat serta menumbuhkan semangat kebersamaan dan gotong royong dalam menjalankan berbagai program.⁴³ Dan di dalam hal pengelolaan dana, transparansi dan akuntabilitas menjadi hal yang sangat krusial. Sumber dana masjid berasal dari sumbangan jamaah atau masyarakat sekitar, sehingga pengurus wajib mengelola keuangan dengan hati-hati dan terbuka agar semua pihak merasa yakin bahwa dana yang diterima digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini penting agar kepercayaan jamaah terhadap pengurus dan masjid tetap terjaga dan berkembang.⁴⁴

Selain itu, manajemen masjid juga harus bersifat adaptif terhadap perkembangan zaman. pada era modern ini, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dapat menjadi alat yang sangat membantu dalam mengelola administrasi masjid, menyampaikan informasi kepada jamaah, maupun memberikan edukasi agama secara lebih efektif. Dengan demikian, masjid dapat tetap relevan dan mampu menjawab kebutuhan umat yang terus berubah seiring perkembangan zaman.⁴⁵ terakhir, manajemen masjid harus didukung oleh visi dan misi yang jelas dan terarah.

visi dan misi berfungsi sebagai panduan utama dalam menjalankan berbagai program dan aktivitas di masjid, seperti peningkatan kualitas ibadah, pengembangan pendidikan agama, dan pemberdayaan sosial kemasyarakatan. Dengan adanya tujuan yang jelas, pengelolaan masjid akan lebih fokus dan terukur dalam memberikan manfaat maksimal bagi umat.⁴⁶

⁴³ Ahmad Tafsir, *Manajemen Organisasi Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015) 134.

⁴⁴ Nur Hasan, *Akuntabilitas Keuangan Lembaga Islam: Teori dan Praktik* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014)

⁴⁵ Siti Zubaidah, "Teknologi Informas dalam Manajemen Masjid", *Nalar: Jurnal Dakwah Digital*, Vol. 3 No.1, (2020) 23-29.

⁴⁶ Fathur Rohman, *Visi dan Misi dalam Manajemen Organisasi Isam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017) 89.

B. Konsep Masjid

1. Definisi Masjid

Masjid berasal dari kata bahasa Arab "masjid" (مَسْجِدٌ) yang berarti tempat sujud. Dalam konteks Islam, masjid merupakan tempat ibadah umat Islam yang digunakan untuk melaksanakan shalat dan berbagai kegiatan keagamaan lainnya. Secara Etimologi kata masjid berasal dari akar kata kerja سَجَدَ (sajada) yang berarti "bersujud". Maka, masjid secara harfiah adalah tempat untuk bersujud kepada Allah.

Sedangkan menurut istilah, definisi Masjid adalah bangunan yang secara khusus diperuntukkan sebagai tempat ibadah bagi umat Islam, terutama untuk melaksanakan shalat berjamaah lima waktu, shalat jumat, shalat tarawih, dan kegiatan keislaman lainnya seperti pengajian, Pendidikan agama, i'tikaf, dan dakwah.⁴⁷

2. Fungsi Masjid

Sebagai Pusat dari Kehidupan Umat Islam, Masjid memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam, tidak hanya sebagai tempat untuk melaksanakan ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan keagamaan, sosial, pendidikan, bahkan ekonomi.

Sejak masa Rasulullah SAW, masjid telah memainkan peran sentral dalam membangun peradaban Islam. Fungsinya jauh melampaui sekadar tempat sujud; ia adalah pusat pembinaan umat, tempat berkumpulnya masyarakat, serta wadah untuk membina akhlak dan memperkuat ukhuwah Islamiyah.

a. Fungsi Utama: Tempat Ibadah

Fungsi yang paling mendasar dari masjid adalah sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah SWT. Di masjid, umat Islam melaksanakan berbagai bentuk ibadah seperti shalat berjamaah, shalat Jumat, shalat tarawih di bulan Ramadan, dan shalat Id pada hari raya. Selain itu, masjid juga menjadi tempat untuk berzikir, membaca Al-Qur'an, berdoa, dan melakukan i'tikaf, khususnya di sepuluh malam terakhir

⁴⁷ Imam Nawawi, *syarah shahiih muslim* (Kairo: Daarul Hadiits, 2019), 156.

bulan Ramadan. Suasana spiritual yang tercipta di masjid memberikan ketenangan dan menjadi sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah.

b. Fungsi Edukatif: Menjadi Pusat Ilmu

Selain berfungsi sebagai tempat ibadah, masjid juga berperan sebagai lembaga pendidikan non-formal. Sejak zaman Rasulullah, masjid digunakan sebagai tempat belajar dan mengajar. Sampai hari ini, masjid masih aktif menggelar kegiatan keilmuan seperti pengajian rutin, majelis taklim, dan kajian tafsir atau fiqih. Untuk anak-anak, masjid menjadi tempat mereka belajar membaca Al-Qur'an melalui program Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA).

Bahkan, di banyak masjid juga diselenggarakan pelatihan keterampilan keagamaan seperti menjadi imam, muadzin, dan khatib. Dengan peran ini, masjid menjadi pusat pengembangan ilmu dan karakter umat Islam.⁴⁸

c. Fungsi Sosial: Membangun Kepedulian dan Ukhuwah

Masjid juga memainkan peranan sosial yang sangat besar. Ia menjadi tempat berkumpulnya masyarakat, tempat bermusyawarah, dan ruang untuk membangun kebersamaan. Masjid sering menjadi titik awal lahirnya kepedulian sosial, baik melalui penyaluran zakat, infak, dan sedekah, maupun lewat program-program sosial seperti santunan anak yatim, bantuan untuk fakir miskin, serta kegiatan sosial lainnya seperti bakti sosial dan pelayanan kesehatan gratis. Melalui fungsi sosial ini, masjid menjadi jembatan yang menghubungkan berbagai lapisan masyarakat, memperkuat solidaritas, dan menumbuhkan semangat tolong-menolong.⁴⁹

d. Fungsi Dakwah: Menyebarkan Nilai-Nilai Islam

Fungsi penting lainnya dari masjid adalah sebagai pusat dakwah. di sinilah nilai-nilai Islam disebar, baik secara lisan melalui ceramah, khutbah, dan diskusi, maupun secara praktik dalam bentuk teladan kehidupan sehari-hari

⁴⁸ Harun Nasution, *Islam ditinjau dari berbagai aspeknya* (Jakarta: UI press, 2021).

⁴⁹ Djamaludin dan Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam perekonomian modern* (Jakarta: Gema Insani 2002)

jamaah masjid. Melalui kegiatan dakwah, masjid tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga mengajak masyarakat untuk mengamalkan ajaran Islam secara kaffah. Dakwah yang dilakukan dari masjid juga berperan dalam membentuk karakter umat yang berakhlak mulia, toleran, dan bertanggung jawab terhadap lingkungannya.

e. Fungsi Ekonomi: Pemberdayaan Umat

Dalam konteks kekinian, beberapa masjid juga mengembangkan fungsi ekonomi sebagai bagian dari upaya memberdayakan umat. Masjid dapat menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan melalui pendirian koperasi syariah, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), program pelatihan keterampilan, hingga bazar atau pasar murah. Fungsi ini sangat relevan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar masjid, khususnya kelompok yang kurang mampu.

Ketika dikelola dengan baik dan amanah, fungsi ekonomi masjid dapat menjadi bentuk nyata dari semangat keadilan sosial dalam Islam. Masjid Sebagai Pilar Peradaban Masjid bukan sekadar bangunan tempat shalat, melainkan pusat kehidupan umat. Ia adalah tempat untuk menata spiritualitas, membangun ilmu pengetahuan, mempererat hubungan sosial, dan mencetak generasi yang berakhlak mulia. Keberadaan masjid yang hidup dan aktif mencerminkan kondisi umat yang kuat dan bersatu. Oleh karena itu, meramaikan masjid bukan hanya sebuah amal ibadah, tetapi juga bentuk kontribusi nyata dalam membangun masyarakat yang beradab, sejahtera, dan diridhai Allah SWT.⁵⁰

3. Tipe-Tipe Masjid.

a. Berdasarkan Fungsinya

Masjid dapat dikategorikan sesuai dengan perannya dalam kehidupan umat Islam sehari-hari:

Masjid Jami merupakan tempat ibadah utama di suatu daerah yang difungsikan untuk pelaksanaan salat Jumat, salat Id, dan acara keagamaan besar lainnya. Umumnya, masjid ini

⁵⁰ Din Wahid, peran masjid dalam masyarakat muslim modern". *Nalar Jurnal: Ilmu Sosial dan Ilmu politik*, Vol.19 No.3, (November, 2016).

memiliki ukuran luas dan menjadi pusat kegiatan keislaman masyarakat setempat.⁵¹

Selanjutnya ada juga Masjid Raya yang memiliki fungsi serupa dengan masjid jami, namun jangkauannya lebih luas. Masjid ini biasanya menjadi ikon keagamaan di tingkat provinsi atau nasional, dengan desain megah dan daya tampung yang besar, seperti Masjid Istiqlal di Jakarta. Contoh lainnya ada juga Masjid Lingkungan atau Masjid Komunitas adalah masjid yang berada di area pemukiman dan digunakan oleh warga sekitar untuk salat lima waktu. Ukurannya biasanya lebih kecil dan melayani kebutuhan ibadah sehari-hari serta kegiatan sosial komunitas. Selain itu ada juga Mushola (Surau) adalah fasilitas ibadah yang lebih kecil dari masjid, dan umumnya tidak digunakan untuk salat Jumat. Mushola bisa ditemukan di sekolah, perkantoran, perumahan, dan tempat umum sebagai sarana salat harian yang praktis. Masjid Institusional merujuk pada masjid yang berada di dalam kompleks lembaga tertentu, seperti universitas, rumah sakit, atau kantor. Fungsi utamanya adalah menyediakan tempat ibadah bagi orang-orang yang beraktivitas di tempat tersebut.⁵²

b. Berdasarkan Gaya Arsitektur

Dari segi desain bangunan, masjid memiliki gaya arsitektur yang beragam dan mencerminkan budaya serta tradisi lokal maupun asing:

Masjid Tradisional Nusantara memiliki bentuk khas dengan atap tumpang (berlapis) dan tidak menggunakan kubah. Material yang digunakan umumnya berupa kayu dan batu alam. Masjid seperti ini banyak ditemukan di wilayah Jawa dan Sumatra, seperti Masjid Agung Demak. lalu Masjid Bergaya Timur Tengah (Kubah dan Menara) identik dengan elemen kubah besar, menara tinggi, serta ornamen kaligrafi dan motif geometris.

⁵¹ Hasan dan Nurhayati, *Arsitektur Masjid Nusantara: sejarah dan perkebangannya* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2015)

⁵² Hamid dan Abdul Wahid, *Islam: The Naatural Way* (London: Mels 1992)

Gaya ini mulai banyak digunakan di Indonesia sejak abad ke-20 dan terinspirasi dari arsitektur Islam klasik. dan Masjid Modern atau Kontemporer menampilkan desain yang lebih sederhana, bersih, dan inovatif. Biasanya menggunakan bahan bangunan modern seperti kaca dan beton, dan tidak selalu memiliki kubah atau menara, tetapi tetap menekankan fungsi spiritualnya. Masjid Bergaya India-Mughal mengadopsi unsur arsitektur dari peradaban Islam di India, dengan ciri kubah berbentuk bawang, pintu besar, serta ornamen rumit seperti ukiran bunga dan lengkungan megah.⁵³

c. Berdasarkan Lokasi

Letak geografis masjid juga memengaruhi bentuk dan penggunaannya:

Masjid di Perkotaan biasanya berukuran besar, modern, dan dilengkapi fasilitas tambahan seperti aula, ruang belajar, dan tempat parkir. Masjid ini sering menjadi tempat berkumpul dan pusat kegiatan keagamaan masyarakat kota. selain itu ada juga Masjid di Pedesaan yaitu masjid yang umumnya lebih sederhana dan dibangun oleh masyarakat setempat secara swadaya. Bangunannya mencerminkan nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan. Selain itu ada juga Masjid di Area Publik seperti di bandara, stasiun, atau pusat perbelanjaan dibuat agar praktis dan mudah diakses, sehingga memudahkan umat Islam melaksanakan salat dalam kondisi mobilitas tinggi.⁵⁴

4. Fungsi Takmir Masjid

Takmir masjid merupakan kelompok atau organisasi yang bertugas mengatur dan mengelola berbagai kegiatan di masjid agar dapat berfungsi secara maksimal sebagai pusat ibadah, pendidikan, sosial, dan pembinaan umat. Peran takmir mencakup sejumlah bidang penting yang mendukung kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan. Dalam hal ibadah, takmir memiliki tanggung

⁵³ Mufid dan Ahmad Syamsul, "Tipologi Masjid berdasarkan fungsi dan Arsitektur." Nalar: Jurnal Ilmiah Arsitektur, Vol. 4 No. 2, (November, 2020), 10-18.

⁵⁴ Arkham dan Muhammad Ridwan, "Transformasi Masjid dari Tradisional ke modern." Nalar: Jurnal Arsitektur Islam, Vol. 2, No. 2 (Januari, 2020), 55-67.

jawab untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti salat lima waktu secara berjamaah, salat Jumat, serta salat pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Selain itu, mereka juga mengatur penugasan imam, muazin, dan khatib, serta memastikan seluruh fasilitas penunjang ibadah tersedia dan terawat dengan baik.⁵⁵ dan di bidang pendidikan, takmir masjid berperan menyelenggarakan berbagai program keilmuan, seperti pengajian rutin, kelas TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an), kajian kitab, serta pelatihan keagamaan bagi jamaah. Masjid pun difungsikan sebagai pusat pembelajaran Islam dan sarana dakwah untuk memperdalam pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama.

Dalam peran sosialnya, takmir turut aktif dalam kegiatan kemasyarakatan seperti pengumpulan dan penyaluran zakat, infak, dan sedekah. Mereka juga membantu warga yang membutuhkan serta menyelenggarakan kegiatan sosial keagamaan, termasuk peringatan hari besar Islam dan kegiatan gotong royong yang mempererat kebersamaan.⁵⁶ Sementara itu, pada aspek manajerial dan administratif, takmir bertugas mengelola keuangan masjid secara transparan dan akuntabel. Mereka juga mengatur administrasi, menyusun program kerja, merawat aset masjid seperti bangunan dan peralatan, serta membuat laporan pertanggungjawaban kepada jamaah atau lembaga yang berwenang.⁵⁷

Dengan demikian, takmir tidak hanya mengurus kegiatan keagamaan, tetapi juga memainkan peran penting dalam menjaga fungsi masjid sebagai pusat kehidupan umat yang menyeluruh, baik dari sisi spiritual, edukatif, sosial, maupun kelembagaan.

C. Konsep Cagar Budaya

Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan yang perlu dilestarikan karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu

⁵⁵ Departemen Agama RI, "Pedoman Pengelolaan Masjid." (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam 2007)

⁵⁶ Mufid dan Ahmad Samsul, "Manajemen Takmir Masjid sebagai upaya Meningkatkan fungsi sosial Masjid". *Nalar: Jurnal Manajemen Dakwah* Vol. 4 No. 2, (2019), 45-56.

⁵⁷ Arifin dan Imron, "Manajemen Masjid Modern: Penguatan Fungsi Masjid di Era Globalisasi". (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press 2020)

pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan. Cagar budaya dapat berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi. di Indonesia, pengertian ini diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yang mendefinisikan cagar budaya sebagai "warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya.

1. Unsur-Unsur Cagar Budaya

Unsur-unsur cagar budaya terdiri dari berbagai komponen penting yang secara bersama-sama menentukan nilai, identitas, dan keberadaan suatu situs atau benda yang dilindungi sebagai warisan budaya yang memiliki arti penting bagi masyarakat dan bangsa. Salah satu unsur utama adalah bangunan dan struktur fisik yang meliputi berbagai jenis bangunan bersejarah seperti rumah adat, candi, benteng, dan berbagai struktur arsitektur lainnya yang memiliki nilai sejarah dan budaya yang melekat kuat.

bangunan-bangunan ini tidak hanya berfungsi sebagai saksi bisu masa lalu, tetapi juga merepresentasikan teknologi, gaya seni, dan kearifan lokal dari zaman pembuatannya. selain itu, lokasi dan lingkungan sekitar cagar budaya juga menjadi unsur yang sangat penting karena tempat keberadaan benda atau situs tersebut beserta lingkungan fisiknya dapat memperkaya pemahaman tentang fungsi, makna, dan konteks sejarahnya. lingkungan ini bisa berupa lanskap alami, tata letak wilayah, maupun hubungan dengan situs-situs lain yang berkaitan secara historis maupun budaya. Keberadaan lingkungan yang masih utuh dan terjaga akan menambah nilai autentik dan keaslian cagar budaya tersebut.⁵⁸

Unsur berikutnya adalah nilai sejarah yang melekat pada benda atau situs cagar budaya. Nilai ini mencerminkan hubungan erat antara cagar budaya dengan peristiwa penting, tokoh bersejarah, atau masa tertentu yang memiliki pengaruh signifikan dalam perjalanan sejarah suatu bangsa atau komunitas. Nilai

⁵⁸ Direktorat Jendral Kebudayaan. "pedoman penetapan dan pengelolaan Cagar Budaya". (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2013)

sejarah ini menjadi alasan utama pelestarian agar generasi mendatang tetap dapat mengenal dan mempelajari akar sejarah mereka. selain itu, nilai budaya dan sosial juga menjadi aspek yang tidak kalah penting.

Cagar budaya sering kali berperan dalam mempertahankan tradisi, adat istiadat, kepercayaan, serta norma sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat. Keberadaan cagar budaya dapat memperkuat identitas kultural dan rasa kebersamaan dalam suatu komunitas. tidak kalah penting adalah nilai estetika yang menonjolkan keindahan, keunikan seni, dan karakter desain atau bentuk yang melekat pada cagar budaya. Aspek estetika ini mencakup keahlian dan kreativitas para pembuatnya serta bisa menjadi inspirasi dalam berbagai bidang seni dan budaya kontemporer.⁵⁹

Selanjutnya, cagar budaya juga memiliki nilai ilmiah dan pendidikan yang sangat tinggi. Situs atau benda tersebut seringkali menjadi sumber utama dalam penelitian sejarah, arkeologi, antropologi, dan bidang ilmu lainnya. Selain itu, keberadaannya dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran dan edukasi bagi masyarakat luas, khususnya generasi muda, agar mereka lebih memahami dan menghargai warisan budaya yang dimiliki. terakhir, material dan bahan penyusun cagar budaya menjadi unsur penting yang menunjukkan keaslian dan kekhasan dari benda tersebut.

Berbagai bahan seperti batu, kayu, logam, dan material tradisional lainnya yang digunakan pada cagar budaya dapat memberikan informasi mengenai teknologi, sumber daya alam, dan teknik konstruksi pada masa lalu. Dengan memperhatikan semua unsur tersebut, pelestarian cagar budaya dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, sehingga nilai-nilai penting dari warisan budaya ini dapat terus diwariskan ke generasi berikutnya.⁶⁰

⁵⁹ Rahmat Soekmono. "Penantar Sejarah Kebudayaan Indonesia". (Jakarta: Balai Pustaka 1985)

⁶⁰ Kusno dan Abidin. "Arsitektur dan Cagar Budaya di Indonesia". (Yogyakarta: Penerbit Kanisius 2000)

2. Syarat Penetapan Cagar Budaya

Suatu benda, bangunan, situs, atau kawasan dapat ditetapkan sebagai cagar budaya apabila memenuhi sejumlah kriteria tertentu. Pertama, benda atau lokasi tersebut harus memiliki nilai sejarah yang signifikan, yang berarti objek tersebut berkaitan dengan peristiwa penting, tokoh berpengaruh, atau perkembangan suatu masyarakat yang memiliki arti khusus dalam perjalanan sejarah bangsa.

Nilai sejarah ini menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan pentingnya pelestarian benda atau tempat tersebut. Selain nilai sejarah, benda atau situs tersebut juga harus memiliki nilai ilmiah atau ilmu pengetahuan. Artinya, objek itu dapat memberikan informasi dan data yang berguna bagi para ahli dari berbagai disiplin ilmu seperti arkeologi, antropologi, sejarah, maupun ilmu kebumihantropologi. Informasi ini sangat penting untuk menambah wawasan tentang kehidupan masa lalu, perkembangan budaya, serta lingkungan alam dan sosial di sekitarnya.⁶¹

Selanjutnya, cagar budaya harus mengandung nilai kebudayaan yang dapat mencerminkan unsur seni, adat istiadat, tradisi, atau kepercayaan yang menjadi bagian dari identitas suatu komunitas atau masyarakat tertentu. Nilai kebudayaan ini menjadikan benda atau kawasan tersebut bukan hanya penting secara fisik, tetapi juga bernilai secara simbolik dan emosional bagi masyarakat yang menggunakannya atau mewarisinya. Dari segi usia, biasanya benda atau bangunan yang dapat ditetapkan sebagai cagar budaya memiliki usia minimal 50 tahun. Namun, batas usia ini bisa berbeda tergantung pada kebijakan daerah atau konteks sejarah tertentu. Usia ini menjadi indikator bahwa benda tersebut telah melewati proses waktu yang cukup untuk memiliki nilai historis dan budaya yang patut dilestarikan.⁶²

Kemudian, benda atau situs tersebut harus memiliki keaslian bentuk dan keutuhan struktur yang memadai. Keaslian ini

⁶¹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. "pedoman penetapan dan pelestarian Cagar Budaya". (Jakarta: Kemendikbud 2015)

⁶² Direktorat Jendral Kebudayaan, Panduan Identifikasi dan Penetapan Cagar Budaya". (Jakarta: Kemendekbud 2017)

penting agar nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak hilang atau berubah secara signifikan sehingga tetap mampu merepresentasikan kondisi aslinya. Keutuhan struktur juga memastikan bahwa benda atau bangunan masih dapat dikenali dan dipahami dalam konteks sejarahnya. Dan terakhir, benda, bangunan, atau kawasan tersebut harus memiliki potensi untuk dilestarikan, yang berarti masih memungkinkan untuk dirawat, dijaga, dan dikembangkan agar tetap terjaga keberadaannya untuk generasi yang akan datang.

Proses pelestarian ini sangat penting agar warisan budaya tersebut tidak punah dan tetap dapat dinikmati serta dipelajari oleh masyarakat luas. dengan memenuhi semua syarat tersebut, suatu benda, bangunan, atau situs dapat ditetapkan secara resmi sebagai cagar budaya oleh instansi yang berwenang, seperti kementerian terkait atau pemerintah daerah. Penetapan ini dilakukan setelah melalui proses kajian mendalam dan rekomendasi dari para ahli yang kompeten di bidangnya.⁶³

3. Tujuan Pelestarian Cagar Budaya

Pelestarian cagar budaya memiliki peranan penting dalam menjaga dan mempertahankan warisan budaya yang menjadi bagian dari identitas dan sejarah bangsa. Tujuan utama pelestarian ini adalah untuk memastikan bahwa peninggalan budaya tersebut tetap terjaga keberadaannya agar dapat dinikmati dan dipahami oleh generasi yang akan datang. Dengan melestarikan cagar budaya, bangsa tidak hanya menjaga bukti fisik dari masa lalu, tetapi juga mengamankan nilai-nilai sejarah, sosial, dan budaya yang terkandung di dalamnya. Selain aspek pelestarian fisik, upaya ini juga bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa melalui penghargaan yang tinggi terhadap warisan budaya tersebut. Melalui pengakuan dan pelestarian warisan budaya, bangsa dapat memperkuat rasa identitas dan kepribadian nasionalnya, yang berperan penting dalam membentuk karakter dan jati diri masyarakat.

⁶³ Muhammad Nasir. "Nilai Sejarah dan kebudayaan dalam pelestarian Cagar Budaya". Vol. 10 No. 2, (2018) 45-60.

Tidak kalah penting, pelestarian cagar budaya juga memiliki tujuan ekonomi dan sosial, yakni memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, seperti peningkatan kesejahteraan melalui pemanfaatan cagar budaya sebagai aset pariwisata dan sumber penghidupan bagi masyarakat lokal. Selain itu, pelestarian ini juga bertujuan untuk meningkatkan citra bangsa di tingkat internasional dengan mempromosikan kekayaan budaya sebagai bagian dari diplomasi budaya dan daya tarik global.⁶⁴

Dari perspektif akademik, pelestarian cagar budaya tidak hanya sebatas menjaga kondisi fisik bangunan atau benda bersejarah, melainkan juga menempatkan pelestarian sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan. Menurut beberapa ahli, pelestarian harus dilakukan secara holistik dan menyeluruh agar manfaat sosial dan ekonominya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat luas.⁶⁵ Pendekatan yang melibatkan masyarakat lokal sangat dianjurkan, karena keterlibatan aktif komunitas menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga serta mengembangkan nilai budaya yang ada. Partisipasi masyarakat tidak hanya memberikan rasa kepemilikan, tetapi juga memastikan bahwa revitalisasi cagar budaya sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat sekitar, sehingga pelestarian tersebut dapat berjalan secara berkesinambungan dan memberikan dampak positif langsung bagi peningkatan kualitas hidup serta pelestarian nilai-nilai tradisional yang menjadi ciri khas daerah tersebut.⁶⁶

Dalam praktiknya, tujuan pelestarian cagar budaya juga dituangkan dalam kebijakan dan regulasi lokal yang mengatur pengelolaan cagar budaya agar dapat dipertahankan keaslian dan integritasnya. Misalnya, di beberapa daerah seperti Kota Bandung, peraturan daerah yang mengatur pengelolaan cagar budaya

⁶⁴ Republik Indonesia. Undang-undang nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

⁶⁵ Uka Tjandrasasmita. "Pelestarian Benda Cagar Budaya dan pemanfaatannya bagi pembangunan Bangsa". *Nalar: Jurnal Suhuf*, Vol. 3 No.1, (2019). 15-27.

⁶⁶ Daud Aris Tanudirja, "Pelestarian Cagar Budaya Harus Bermanfaat Bagi Masyarakat", <https://republika.co.id/berita/qazv11423/pelestarian-cagar-budaya-harus-bermanfaat-bagi-masyarakat>. (4 juli 2025).

menekankan pentingnya menjaga keaslian dan melindungi cagar budaya dari berbagai ancaman kerusakan. Selain itu, kebijakan tersebut juga mendorong pemanfaatan cagar budaya secara tepat guna untuk mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan citra kota. Di daerah lain seperti Kabupaten Purbalingga, pelestarian cagar budaya tidak hanya difokuskan pada aspek konservasi, tetapi juga sebagai sumber daya ekonomi melalui pengembangan pariwisata budaya yang dapat mendorong kesejahteraan masyarakat lokal. Dengan demikian, pelestarian cagar budaya tidak hanya menjadi kewajiban konservasi tetapi juga bagian dari strategi pembangunan yang berorientasi pada manfaat sosial dan ekonomi.⁶⁷

4. Jenis-Jenis Cagar Budaya

Cagar budaya merupakan warisan berharga yang dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan wujud fisik maupun aspek nonfisiknya, yang keduanya memiliki peran penting dalam melestarikan sejarah dan identitas budaya suatu bangsa. Pertama-tama, cagar budaya yang berupa benda mencakup berbagai peninggalan fisik yang memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi, seperti bangunan-bangunan bersejarah yang meliputi candi-candi peninggalan masa lampau, benteng-benteng pertahanan yang dahulu digunakan dalam peperangan, serta rumah adat yang menjadi simbol budaya dan tradisi masyarakat setempat.⁶⁸

Selain itu, dalam kategori benda ini juga termasuk monumen-monumen dan prasasti-prasasti yang berfungsi sebagai tanda atau pengingat penting tentang peristiwa bersejarah yang terjadi di masa lalu, contohnya tugu atau batu prasasti yang memuat tulisan-tulisan kuno sebagai dokumentasi sejarah yang tak ternilai harganya. Selain itu, benda-benda peninggalan lain yang masuk dalam kategori ini adalah artefak-artefak berupa alat-alat tradisional, senjata kuno, maupun keramik-keramik yang memiliki

⁶⁷ Pejabat dan pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Purbalingga, "Keberadaan Cagar Budaya Perlu dilestarikan", <https://ppid.purbalinggakab.go.id/keberadaan-cagar-budaya-perlu-dilestarikan>. (4 juli 2025)"

⁶⁸ Budi Supriyanto, pelestarian Cagar Budaya di Indonesia: Perspektif Sejarah dan Hukum (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017), 45-48.

nilai arkeologis tinggi dan menggambarkan kehidupan masyarakat pada zamannya.⁶⁹

Selanjutnya, cagar budaya yang berbentuk tak benda meliputi warisan budaya yang bersifat non-fisik namun memiliki peranan penting dalam mempertahankan identitas budaya suatu komunitas. hal ini mencakup tradisi-tradisi dan upacara-upacara adat yang dilakukan secara turun-temurun, seperti tarian tradisional dan ritual keagamaan yang menjadi bagian dari kehidupan spiritual dan sosial masyarakat, sekaligus sebagai media pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.⁷⁰

Bahasa dan karya sastra tradisional, seperti lagu-lagu daerah, pantun, serta cerita rakyat yang diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi, juga tergolong dalam jenis cagar budaya tak benda ini, karena berfungsi sebagai sarana penyampaian nilai budaya dan sejarah yang tidak dapat disentuh secara fisik. Selain itu, pengetahuan dan keterampilan tradisional seperti teknik pembuatan kerajinan tangan khas daerah tertentu dan sistem pertanian tradisional yang sudah ada sejak zaman nenek moyang juga merupakan bagian dari cagar budaya tak benda yang perlu dilestarikan agar tidak punah.⁷¹

Selain kedua kategori tersebut, cagar budaya juga dapat berupa situs, yaitu lokasi-lokasi tertentu yang memiliki nilai sejarah dan arkeologis yang sangat penting, seperti bekas pemukiman kuno atau tempat-tempat di mana terjadi pertempuran besar yang menjadi tonggak sejarah suatu bangsa. Terakhir, cagar budaya berbentuk kawasan merupakan area atau wilayah yang terdiri atas kumpulan situs, bangunan, dan elemen budaya lainnya yang secara bersama-sama membentuk kesatuan ruang budaya yang utuh dan harmonis. Contoh dari jenis ini adalah kawasan kota tua atau desa adat yang tidak hanya menyimpan bangunan bersejarah, tetapi juga kehidupan sosial dan budaya masyarakat

⁶⁹ Budi Supriyanto, *pelestarian Cagar Budaya di Indonesia: Perspektif Sejarah dan Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017), 45-48.

⁷⁰ Budi Supriyanto, *pelestarian Cagar Budaya di Indonesia: Perspektif Sejarah dan Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017), 45-48.

⁷¹ Budi Supriyanto, *pelestarian Cagar Budaya di Indonesia: Perspektif Sejarah dan Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017), 45-48.

yang masih berlangsung hingga kini, sehingga kawasan tersebut menjadi cerminan nilai-nilai budaya yang kaya dan komprehensif.⁷²



⁷² Budi Supriyanto, pelestarian Cagar Budaya di Indonesia: Perspektif Sejarah dan Hukum (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017), 45-48.